

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program global yang disepakati oleh negara-negara dunia untuk mencapai kesejahteraan global melalui 17 tujuan dan 169 sasaran, salah satunya yang berkaitan dengan penanganan *stunting* adalah tujuan ke-2, yaitu “*zero hunger*”, yang berfokus pada menghilangkan kelaparan, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi yang baik. Dalam hal ini, target 2.2 bertujuan mengurangi malnutrisi, termasuk *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah 5 tahun, sebesar 40% pada tahun 2025.

Administrasi publik memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya terkait kesehatan balita dan pengentasan *stunting*. Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014), administrasi publik adalah proses mengorganisasi dan mengkoordinasikan sumber daya serta personel publik untuk merancang, menerapkan, dan mengelola keputusan yang tercantum dalam kebijakan publik. Dalam hal pengentasan *stunting*, administrasi publik berperan vital dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan kebijakan serta program-program yang bertujuan menurunkan prevalensi *stunting*, memperbaiki gizi, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil.

Administrasi publik juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan alokasi dana yang efisien, serta sarana dan prasarana yang memadai, guna memastikan kebijakan yang diambil

berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, administrasi publik dapat memastikan bahwa target penurunan *stunting* tercapai, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

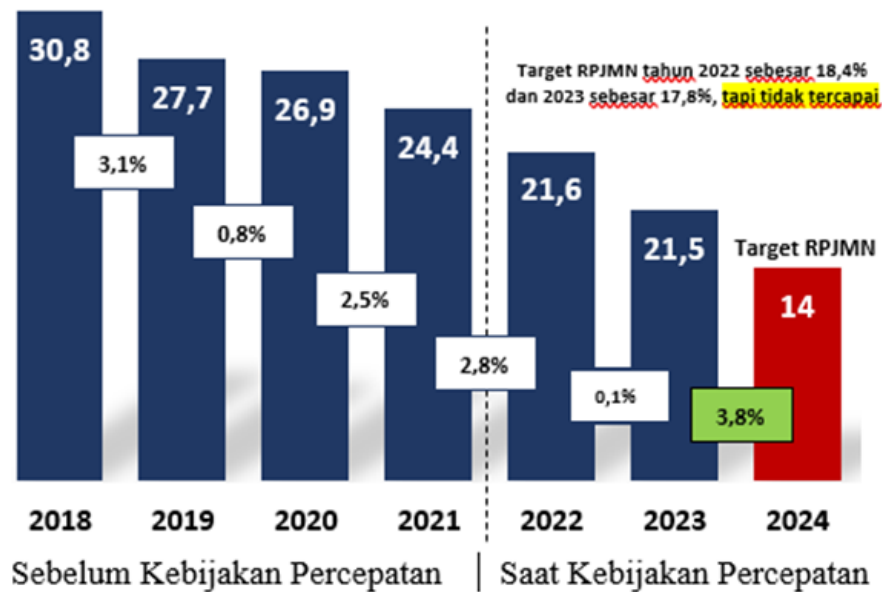
Administrasi publik mencakup berbagai disiplin ilmu, salah satunya kebijakan publik, yang berperan penting dalam mengatasi masalah sosial seperti *stunting*. Thomas Dye (dalam Nugroho, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk *stunting*. Menurut Winarno (2007), kebijakan publik adalah seperangkat langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah dan dalam hal ini *stunting* adalah masalah yang memerlukan tindakan terpadu dan terkoordinasi.

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan menurut Birkkan (dalam Akib, 2010). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Proses implementasi ini bersifat kompleks, melibatkan berbagai pihak, tujuan, dan standar yang harus dipenuhi, serta faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018), implementasi kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, individu, atau pihak swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh

karena itu, meskipun kebijakan telah dibuat dengan baik namun tanpa implementasi yang efektif maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Percepatan penurunan *stunting* merupakan bagian dari kebijakan publik yang menargetkan peningkatan kualitas SDM melalui intervensi kesehatan, pendidikan, dan gizi. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang memengaruhi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh implementasi yang komprehensif, termasuk pada tingkat daerah.

Dalam kebijakan terkait percepatan penurunan *stunting* terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi dasar adalah Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Presiden tersebut dibahas mengenai tujuan dari percepatan penurunan *stunting*, yaitu menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Regulasi ini memiliki peran utama dalam mengatur pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.



Gambar 1.1 Prevalensi *Stunting* di Indonesia pada tahun 2018-2022

Sumber: bit.ly/BukuSakuSSGI2022, diolah

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6% dan 21,5% tahun 2023, angka ini masih tinggi dan belum mencapai target RPJMN yang seharusnya pada tahun 2022 sebesar 18,4% sementara tahun 2023 hanya sebesar 17,8%. Kondisi ini mengindikasikan upaya yang dilakukan belum mampu menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia.

Tiap Pemerintah daerah di Indonesia membuat kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, salah satunya di Kota Semarang dengan regulasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang. Kebijakan ini harus dilaksanakan di tingkat bawah, seperti Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.

Tabel 1.1 Kasus *Stunting* di Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah
Semarang Utara	195
Semarang Barat	137
Semarang Tengah	69
Semarang Timur	86
Semarang Selatan	81
Ngaliyan	136
Pedurungan	116
Banyumanik	99
Tembalang	68
Mijen	80
Genuk	44
Gunung Pati	114
Gajah Mungkur	40
Gayamsari	46
Candisari	34
Tugu	41
Total	1.386

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023 (diolah)

Data tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Semarang Utara memiliki total 195 kasus *stunting*, menjadikannya sebagai kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak. Kondisi ini menandakan upaya yang dilakukan belum maksimal karena kecamatan ini masih mencatatkan jumlah *stunting* tertinggi.

Tabel 1.2 *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara Per Kelurahan 2023

Kelurahan	Kasus <i>Stunting</i>	Persentase %
Tanjung Mas	89	45,64
Bandarharjo	57	29,23
Kuningan	23	11,79
Dadapsari	14	7,18
Bulu Lor	2	1,03
Plombokan	5	2,56
Purwosari	3	1,54
Panggung Kidul	2	1,03
Panggung Lor	0	0
Total	195	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang & Puskesmas Bandarharjo, 2023 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, terdapat gap atau kesenjangan yang signifikan terkait kasus balita *stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Kelurahan Tanjung Mas memiliki tingkat prevalensi *stunting* yang sangat tinggi, dengan 89 kasus pada tahun 2023, yang mencakup 45,64% dari total kasus *stunting* di kecamatan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan balita di Kelurahan Tanjung Mas dari *stunting*, diantaranya pada tahun 2021 masuk daftar lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* di Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/365/V/2021, yang mencakup 25 kelurahan. Tanjung Mas juga menjadi salah satu dari dua kelurahan yang dijadikan *pilot project* penanganan *stunting* pada tahun yang sama. Pada tahun 2022, kelurahan ini kembali ditetapkan sebagai fokus intervensi penurunan *stunting* melalui Keputusan Walikota Semarang No. 050/209/2022, yang mencakup 161 kelurahan, dan masuk dalam daftar Desa Lokus Prioritas 360 Kab/Kota Tahun 2022 untuk intervensi percepatan penurunan *stunting* (dashboard.stunting.go.id, 2023).

Tabel 1.3 Kelurahan di Kota Semarang yang telah mencapai Zero Stunting Pada Tahun 2023

KELURAHAN	BULAN										
	JAN	FEBR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV
BANGUNHARJO	3	4	2	3	3	3	2	0	0	0	0
KARANGTEMPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEBONAGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAWANG SARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
WONOTINGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PETOMPON	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
MUKTIHARJO LOR	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
GEBANGSARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERBOYO WETAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERBOYO KULON	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
KALICARI	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
MANGUNHARJO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
KEDUNG MUNDU	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	0
GUNUNG PATI	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
MANGUNSARI	2	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0
NONGKOSAWIT	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
KANDRI	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
SADENG	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
TAMBANGAN	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
KEDUNG PANI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
PESANTREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RANDU GARUT	4	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0

Sumber: bit.ly/UpayaPercepatanPenurunanStuntingKotaSemarang, 2023

Menurut tabel tersebut, sejumlah kelurahan di Kota Semarang telah mencapai status *zero stunting* pada tahun 2023. Di kala sudah terdapat kelurahan dengan jumlah *stunting* terendah pada tahun 2023, namun Kelurahan Tanjung Mas belum masuk dalam daftar tersebut. Artinya kelurahan Tanjung Mas belum mencapai status *zero stunting*.

Tabel 1. 4 Kelurahan dengan Kasus *Stunting* Tertinggi di Kota Semarang Pada tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan <i>stunting</i> tertinggi	Jumlah kasus
1	Semarang Utara	Tanjung Mas	89
2	Ngaliyan	Wonosari	40
3	Semarang Timur	Kemijen	39
4	Gunungpati	Sukorejo	23
5	Semarang Barat	Kembangarum	20
6	Pedurungan	Muktiharjo Kidul	20
7	Candisari	Jomblang	19
8	Semarang Selatan	Lamper Tengah	18
9	Tembalang	Meteseh	18
10	Banyumanik	Jabungan	16
11	Mijen	Purwosari (Mijen)	15
12	Semarang Tengah	Pindrikan Lor	14
13	Gajahmungkur	Gajahmungkur	14
14	Gayamsari	Tambakrejo	12
15	Tugu	Tugurejo	10
16	Genuk	Karangroto	9

Sumber: bit.ly/DataStuntingdiKotaSemarang2023, diolah

Meskipun Kelurahan Tanjung Mas sudah masuk dalam daftar lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* di Kota Semarang berdasarkan SK Walikota

Semarang dan beberapa kelurahan lain telah mencapai status *zero stunting*, namun data di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung Mas masih mencatatkan jumlah *stunting* tertinggi di kota ini, dengan 89 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Ketua Forum Posyandu Kelurahan Tanjung Mas, pada 22 Oktober 2023, faktor utama penyebab kasus *stunting* di kelurahan tersebut meliputi kondisi ekonomi masyarakat, banjir rob, banyaknya ibu muda yang bekerja di pabrik, serta pola asuh yang minim pengetahuan. Selain itu, penelitian oleh Salsabila & Santoso (2023) dalam studi "Collaborative Governance dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang" menjelaskan bahwa kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan faktor alam yang sulit diatasi menjadi hambatan dalam peningkatan sanitasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga balita di Kelurahan Tanjung Mas masih belum terbebas dari *stunting*.

Dari data di atas yang menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung Mas terdapat masalah karena tingginya jumlah kasus *stunting* sehingga penting bagi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting* dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan guna mampu menetapkan intervensi yang tepat. Inilah yang menjadi urgensi penelitian dalam penelitian ini.

Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang, dalam perspektif disiplin Ilmu Administrasi publik, merupakan proses pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat. Dalam konteks percepatan penurunan *stunting*, administrasi

publik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang dirancang untuk menangani masalah kesehatan masyarakat secara holistik. Kota Semarang, melalui Peraturan Walikota dan pelaksanaan intervensi di tingkat kelurahan, berupaya menunjukkan peran aktif administrasi publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, efektivitas administrasi publik sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, efisiensi sumber daya, serta partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Terkait implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas akan dianalisis menggunakan sejumlah pasal dalam Perwali Semarang No. 27 Tahun 2022. Sementara itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan, serta sikap pelaksana (Mulyadi, 2018). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam melakukan usaha menurunkan prevalensi *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

Dengan adanya latar belakang ini, yang melandasi dibuatnya penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. *Stunting* masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia, tahun 2023 prevalensi *stunting* mencapai 21,5% belum mencapai target WHO sebesar 20% dan target RPJMN tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 17,8%.
2. Kecamatan Semarang Utara mencatatkan jumlah tertinggi dengan 195 kasus *stunting*. Khususnya, Kelurahan Tanjung Mas menjadi penyumbang terbesar dengan 89 kasus *stunting* pada tahun 2023.
3. Penyebab *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas mencakup kondisi ekonomi masyarakat, banjir rob, banyaknya ibu muda yang bekerja di pabrik, pola asuh yang minim pengetahuan, dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.
4. Sejumlah kelurahan di Kota Semarang telah mencapai status *zero stunting* tahun 2023 sementara Kelurahan Tanjung Mas masih memiliki jumlah *Stunting* terbanyak di Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

2. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama pada studi implementasi kebijakan dan menjadi referensi bacaan mengenai analisis implementasi kebijakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam menggambarkan implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak terkait lainnya dalam menjalankan kebijakan agar mendapatkan *output* yang optimal.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdiri dari sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat memudahkan dalam menemukan bahan pembandingan dan menambah wawasan peneliti berkenaan fenomena penelitian yang dibahas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Penelitian Maysara Edriani dan Rapotan Hasibuan (2023) yang berjudul Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di UPT Puskesmas Terjun Kota Medan. Teori dari Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975) digunakan dalam penelitian ini yang terdapat enam faktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus melalui wawancara mendalam. Faktor penyebab angka *stunting* di Kota ini belum mencapai target WHO, yakni adanya keyakinan masyarakat bahwa *stunting* bukanlah masalah serius, hanya karena faktor keturunan. Keyakinan ini diperkuat oleh faktor ekonomi dan tindakan mereka yang menentang pemberian makanan tambahan pada bayi selama 1.000 HPK. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di UPT Puskesmas Terjun telah sesuai dengan Perwal Kota Medan No. 18 Tahun 2020. Komunikasi kebijakan dan disposisi petugas menunjukkan kesiapan tugas, standar dan sasaran program telah tercapai, Struktur birokrasi dioptimalkan dengan prosedur dan evaluasi yang jelas. Namun, kurangnya SDM, kondisi lingkungan kumuh, dan rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi menjadi hambatan utama (Edriani & Hasibuan, 2023).

Penelitian dari Triana Wahyuningsih & Sedarmayanti (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Dua faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh tingkat kemiskinan

ekstrem di sebagian besar dari 27 desa lokus *stunting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan baik. Namun, ada beberapa kendala, seperti masih adanya desa dengan kemiskinan ekstrem, manajemen basis data yang belum terintegrasi, dan kurangnya pendanaan dari sektor swasta (Wahyuningsih & Sedarmayanti, 2023).

Kurnia Tri Hermawan dan Indah Gilang Pusparani menulis penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Cirebon (2023). Salah satu penyebab terjadinya *stunting* di wilayah ini adalah pola asuh orang tua yang masih mempercayai mitos-mitos keliru terhadap pemberian asupan makanan. Model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan sumber daya digunakan dalam penelitian ini. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan wawancara. Menurut temuan penelitian, kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Cirebon dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon No. 34 Tahun 2022, yang dianalisis dengan empat faktor, yaitu komunikasi, pemangku kepentingan terlibat dalam konsultasi *stunting*, layanan sosialisasi, pembinaan kader posyandu, dan rapat koordinasi. Dalam hal sumber daya, Pemda Kota Cirebon sudah memiliki fasilitas dan anggaran yang mendukung, namun perlu peningkatan kuantitas peralatan di posyandu dan kemampuan sumber daya manusia. Penurunan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2022 menunjukkan sikap komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan. Namun, pendanaan dan infrastruktur yang memadai masih dibutuhkan. Struktur birokrasi TPPS sudah

melibatkan berbagai instansi, tetapi pembuatan SOP untuk pemantauan dan evaluasi yang lebih efisien masih diperlukan (Hermawan & Pusparani, 2023).

Penelitian Nor Fahrina dan Muhammad Taupik (2023) berjudul *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Perbaikan Gizi Anak di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong*. Empat faktor dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III digunakan peneliti untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dan variabel-variabel penentunya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Dalam Perbaikan Gizi Anak di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sudah diimplementasikan dengan baik (Fahrina & Taupik, 2023).

Penelitian dari Ricca Handayani dan Sri Rahayu (2023) berjudul *Analysis of Stunting Management Policy : Case of Pandeglang*. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah daerah Pandeglang yang merupakan daerah dengan angka *stunting* tertinggi di Provinsi Banten. Pola pengasuhan yang tidak tepat dan kurangnya partisipasi orang tua merupakan dua faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka *stunting* di Kabupaten Pandeglang. Model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) digunakan dalam penelitian ini. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui publikasi, tinjauan literatur, dan laporan studi lainnya. Berdasarkan temuan penelitian ini, kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai meskipun terdapat beberapa kendala, seperti komunikasi

dan koordinasi ke masyarakat belum berjalan efektif, kurangnya kesadaran akan kesehatan dan rendahnya wawasan tentang *stunting* (Handayani & Rahayu, 2023).

Penelitian dari Dian Rosa Sunaryo, Candradewini, dan Ria Arifianti (2021) berjudul Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn. Penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung belum berhasil menurunkan kasus *Stunting*, walaupun kegiatan pencegahan intervensi gizi sensitif serta spesifik telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai standar dan sasaran kebijakan, akibat sosialisasi yang kurang menyeluruh dan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19. Selain itu, petugas kesehatan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19, ketidaktersediaan sarana seperti alat timbang, dan pengurangan dana akibat *refocusing* anggaran pada 2020 juga menjadi kendala. Komunikasi antar stakeholder juga belum optimal, terutama setelah peralihan ke metode daring, sementara kondisi sosial, ekonomi, politik, dan dampak pandemi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Sunaryo dkk., 2021).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Supian Suri, Muchlis Hamdi, Ismail Nurdin, Sampara Lukman, & Fathir Fajar Sidiq (2024) berjudul *Analyzing Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of Stunting Reduction Acceleration Policy in Depok City*. Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Christoph Knill & Jale Tosun. Analisis memanfaatkan aplikasi NVivo 14 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa faktor-faktor seperti kemauan politik, inovasi program, kualitas sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat sangat mendukung percepatan penurunan *stunting*. Namun, inefisiensi anggaran dan ego sektoral diidentifikasi sebagai hambatan utama yang menghalangi upaya tersebut (Suri dkk., 2024).

Selanjutnya, *Implementation of Accelerated Stunting Reduction at the Biromaru Public Health Center, Sigi Regency* judul penelitian dari Sudirman, Rosnawati, Nur Afni, Ahmad Yani, & Muhammad Syukran (2023), dengan menggunakan kerangka kerja Edward III. Pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Puskesmas Biromaru, Kabupaten Sigi, belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari sumber daya fasilitas masih terbatas, seperti timbangan dan alat pengukur tinggi badan yang tidak tersedia di semua posyandu akibat keterbatasan anggaran di setiap desa. Meskipun tidak adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas, petugas di Puskesmas berupaya menjalin komunikasi yang baik (Sudirman dkk., 2023).

Penelitian *Implementation of Stunting Reduction Acceleration Policy in Ponorogo Regency* oleh Faradila Aisyah (2023) menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh dari laporan pemerintah, wawancara langsung, pengamatan di lapangan, dan dokumentasi. Kasus *stunting* di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh kondisi fasilitas kesehatan yang tidak memadai, asupan gizi yang tidak tercukupi, dan rendahnya pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian mengungkapkan implementasi kebijakan

percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, yang didukung dengan standar dan tujuan yang jelas, koordinasi, komunikasi yang baik, serta komitmen organisasi pelaksana. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan pengalokasian dana desa, kurangnya pemahaman dan kompetensi beberapa implementor, serta evaluasi bulanan yang dinilai kurang efektif (Aisyah, 2023).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokus penelitian dimana memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan tingkat urgensinya berbeda dan informan yang diwawancarai. Perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi temuan penelitian karena kondisi geografis dan masyarakat yang berbeda di setiap daerah mampu memberikan dampak yang berbeda pada proses implementasi kebijakan.

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014) mengemukakan administrasi publik adalah suatu proses mengorganisasi dan mengkoordinasikan sumber daya dan personel publik yang bertujuan merancang, menerapkan, dan mengelola keputusan yang tercantum pada kebijakan publik. Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) menguraikan administrasi publik merupakan perpaduan antara teori dan pelaksanaannya dalam memberikan pemahaman terkait peran pemerintah dengan masyarakat serta mendorong adanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pasolong (2012), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi yang mencakup sumber daya (manusia, dan peralatannya) guna mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi antara teori dan pelaksanaannya oleh sekelompok orang atau lembaga untuk menyelesaikan masalah publik guna mencapai kepentingan bersama. Administrasi publik berfungsi menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Teori administrasi publik dibutuhkan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Thomas Kuhn (dalam Pasolong, 2012: 26), paradigma yaitu perspektif, seperangkat nilai, pendekatan, ide dasar, atau strategi untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mengetahui realitas sosial tertentu secara spesifik. Nicholas Henry (2017) menguraikan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

Paradigma 1 (1900-1926), Frank J. Goodnow dan Leonard D. White Goodnow menjelaskan bahwa politik menitikberatkan perhatiannya pada kebijakan untuk memenuhi kehendak masyarakat, sedangkan administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi harus dipisahkan dari pengaruh politik agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam birokrasi pemerintahan. Namun, fokusnya masih kurang berkembang, karena hanya menekankan aspek lokasi tanpa mengkaji lebih dalam mengenai aspek lainnya dalam administrasi.

Paradigma 2 (1927-1937), Willoughby, Gullick & Urwick memperkenalkan prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip ini meliputi

perencanaan, pengorganisasian, SDM, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran yang dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik publik maupun privat. Dalam paradigma ini, fokus administrasi publik adalah pada penguasaan keahlian dasar melalui prinsip-prinsip administrasi tersebut.

Paradigma 3 (1950-1970) ini muncul sebagai tanggapan terhadap kritik dari ilmuwan politik yang berargumen bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Berlawanan dengan pandangan sebelumnya, paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik, dengan lokus pada birokrasi pemerintahan. Namun, fokus dari administrasi publik masih belum ditemukan karena banyaknya kekurangan pada prinsip-prinsip administrasi. Selain itu, kritik yang diajukan tidak menawarkan solusi terkait fokus tersebut, menyebabkan administrasi publik mengalami krisis identitas.

Paradigma 4 (1956-1970) menekankan pada prinsip manajemen secara menyeluruh. Perilaku organisasi kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan lainnya merupakan fokus dari paradigma ini. Adapun paradigma ini terdapat dua orientasi, yaitu ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Lokus administrasi publik dalam paradigma ini tidak jelas karena semua fokus yang dikembangkan diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya di sektor komersial tetapi juga di bidang administrasi publik

Paradigma 5 (1970-Sekarang), pada paradigma ini memandang administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Fokus dari paradigma ini adalah manajemen publik, organisasi publik, dan kebijakan publik, lokus nya sendiri adalah masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 (1980-sekarang) didefinisikan sebagai sebuah cara, prosedur, praktik pemerintah yang mengatur sumber daya dan kepentingan publik. Paradigma ini mempunyai tiga aktor sentral dalam keberjalanannya yaitu *government*, swasta, dan masyarakat. Fokus utama paradigma ini adalah peran aktor dan jaringan di luar pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa publik.

Penelitian implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas termasuk dalam paradigma kelima karena memiliki fokus pada kebijakan publik yang bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dari pemerintah dalam menurunkan kasus *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

1.6.4 Kebijakan Publik

Thomas Dye (dalam Nugroho, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menyoroti fakta bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan oleh sektor swasta, dan bahwa pemerintah harus membuat keputusan-keputusan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pasolong (2014: 29) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling terkait yang diambil oleh pejabat atau badan pemerintah dalam berbagai bidang seperti energi, kesehatan, pendidikan, kriminalitas, dan wilayah perkotaan. Sedangkan menurut Winarno (2007), kebijakan publik adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh satu aktor atau lebih untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan mengatasi masalah publik. Tahapan

kebijakan publik menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2013: 13-14), yaitu:

1. Menetapkan agenda, yakni proses menempatkan masalah publik dalam agenda kebijakan guna mengatasi masalah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses dimana pemerintah mengembangkan sejumlah alternatif atau pilihan kebijakan.
3. Pembuatan kebijakan, yakni pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dengan jelas menguraikan masalah yang harus dipecahkan, tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai pendekatan untuk mengatur proses implementasinya.
4. Implementasi kebijakan, yakni langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini bersifat kompleks karena melibatkan berbagai pihak, tujuan, dan standar yang harus dipenuhi, serta kompleksitas program dan unit pelaksana. Selain itu, dampak dari faktor-faktor eksternal juga berperan penting dalam proses ini.
5. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk menentukan sejauh mana suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil, khususnya dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

Proses kebijakan yang terjadi berkenaan dengan penelitian ini berada pada proses implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, yang dijalankan berdasarkan Perwali Semarang No. 27 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang.

1.6.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Kadji, 2005:48), adalah pelaksanaan dari pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat mendasar, yang dapat berbentuk undang-undang, arahan presiden, atau keputusan pengadilan. Pilihan ini menetapkan tujuan dan metode implementasi selain mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau pihak swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan mengenali masalah, yang dapat menyebabkan kegagalan. Masalah yang ada tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan yang baik jika tidak diimplementasikan secara efektif.

Dari pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang berbentuk undang-undang atau keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditentukan.

1.6.6 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan akan mudah dipahami apabila dianalisis dengan menggunakan model tertentu. Model yang digunakan akan memberikan gambaran tentang objek, kondisi atau proses sehingga memudahkan untuk melihat apakah kebijakan dilaksanakan dengan baik. Terdapat dua pendekatan dalam model implementasi kebijakan, yaitu :

1. Pendekatan *Top-Down* adalah analisis implementasi kebijakan yang dimulai dari keputusan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Secara sederhana diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat
2. Pendekatan *Bottom-Up* adalah pendekatan yang mengidentifikasi faktor lain yang diakibatkan karena interaksi organisasi dalam proses implementasi. Pendekatan ini menekankan bahwa implementasi kebijakan bersumber dari keputusan yang dibuat individu atau masyarakat sendiri.

Beberapa model implementasi kebijakan publik menurut para ahli yang diklasifikasikan menurut pendekatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan	Model Implementasi Kebijakan
<i>Top-Down</i>	Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975) terdapat enam faktor, yaitu: 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Komunikasi antar badan pelaksana 4. Karakteristik badan pelaksana 5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 6. Disposisi/sikap implementor a. Respons implementor terhadap kebijakan b. Kognisi/pemahaman kebijakan c. Intensitas disposisi implementor
	Merilee S. Grindle (1980) terdapat dua faktor, yaitu: 1. Isi Kebijakan a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan b. Jenis manfaat yang dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Kedudukan pembuat kebijakan e. Siapa pelaksana kebijakan f. Sumber daya yang dihasilkan 2. Lingkungan Kebijakan a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pendekatan	Model Implementasi Kebijakan
	c. Kepatuhan dan daya tanggap
	George Edwards III (1980) terdapat empat faktor, yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
	Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983) terdapat tiga faktor, yaitu: 1. Karakteristik dari masalah a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran c. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan 2. Karakteristik kebijakan a. Kejelasan isi kebijakan b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan 3. Faktor lingkungan a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan c. Sikap dari kelompok pemilih dalam masyarakat d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
<i>Bottom-Up</i>	Thomas B. Smith (1973) terdapat empat faktor, yaitu: 1. Kebijakan yang diidealkan 2. Kelompok sasaran 3. Organisasi Pelaksana 4. Faktor Lingkungan
	Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981) terdapat tiga faktor, yaitu:

Pendekatan	Model Implementasi Kebijakan
	1. Isi kebijakan 2. Lingkungan kebijakan 3. Dampak Model ini mengidentifikasi jaringan kerja implementor dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas dan sasarannya.

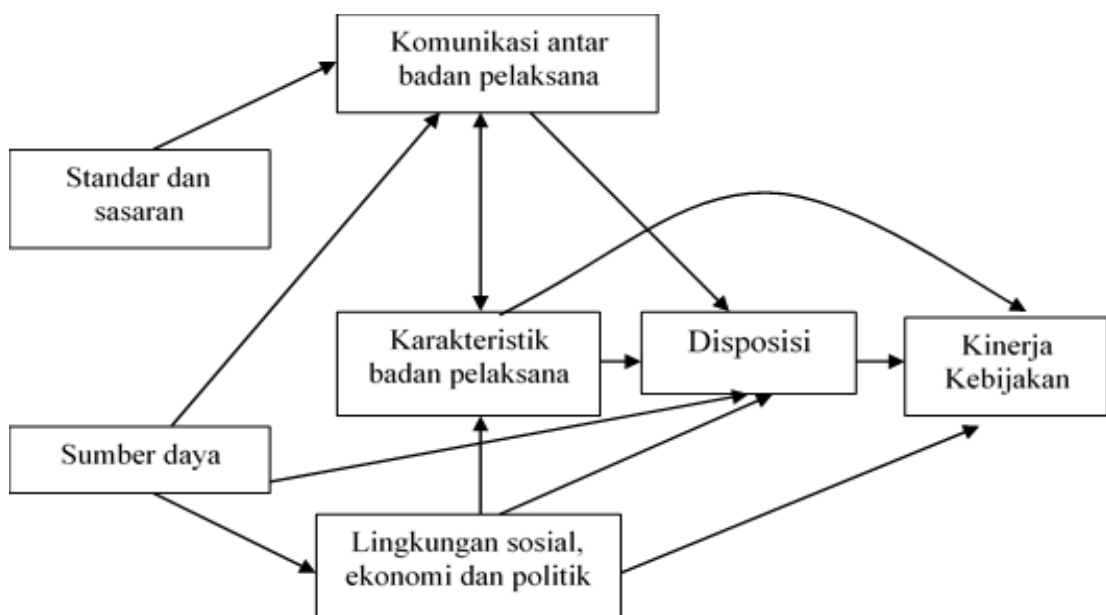
Sumber: Deddy Mulyadi (2018: 68-73) dan Riant Nugroho (2015: 219-226), (diolah oleh peneliti)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *top-down*, dengan landasan bahwa Pemerintah Kota Semarang sebagai pembuat kebijakan yang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang akan dijalankan oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Proses penyusunan regulasi tersebut juga berdasarkan acuan dari kebijakan pemerintah di atasnya (pusat), yaitu Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. Artinya, kebijakan ini juga wajib dilakukan oleh implementor kebijakan yang ada di bawah, yaitu di tingkat kota kecamatan hingga kelurahan.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018) digunakan dalam penelitian ini karena secara komprehensif mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Model ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor di tingkat lokal, termasuk hambatan yang dihadapi, serta membantu peneliti menggali kondisi lapangan dengan mempertimbangkan faktor kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan eksternal. Model ini memuat enam faktor yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan memuat standar dan sasaran suatu kebijakan dengan jelas dan dapat diukur untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pelaksana.
- b. Sumber daya, terdiri atas sumber daya manusia dan non manusia (dana, fasilitas, dan lainnya). Faktor sumber daya mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya manusia berkualitas, keberhasilan implementasi dapat tercapai, dan jika sumber daya non-manusia memadai, kinerja implementasi akan meningkat. Sebaliknya, kekurangan pada salah satu sumber daya tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan.
- c. Komunikasi antar badan pelaksana, menentukan pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Komunikasi antar organisasi merujuk untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi antar badan pelaksana kebijakan.
- d. Karakteristik badan pelaksana, mencakup struktur organisasi. Faktor ini dapat berdampak pada bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan, maka hal ini menjadi modal utama.
- e. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, berkaitan dengan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, seperti bagaimana kedudukan seseorang dalam kemampuan memenuhi kebutuhannya, bagaimana sikap masyarakat mendukung/menolak, dan apakah pemerintah dan kelompok kepentingan terkait mendukung pelaksanaan kebijakannya.

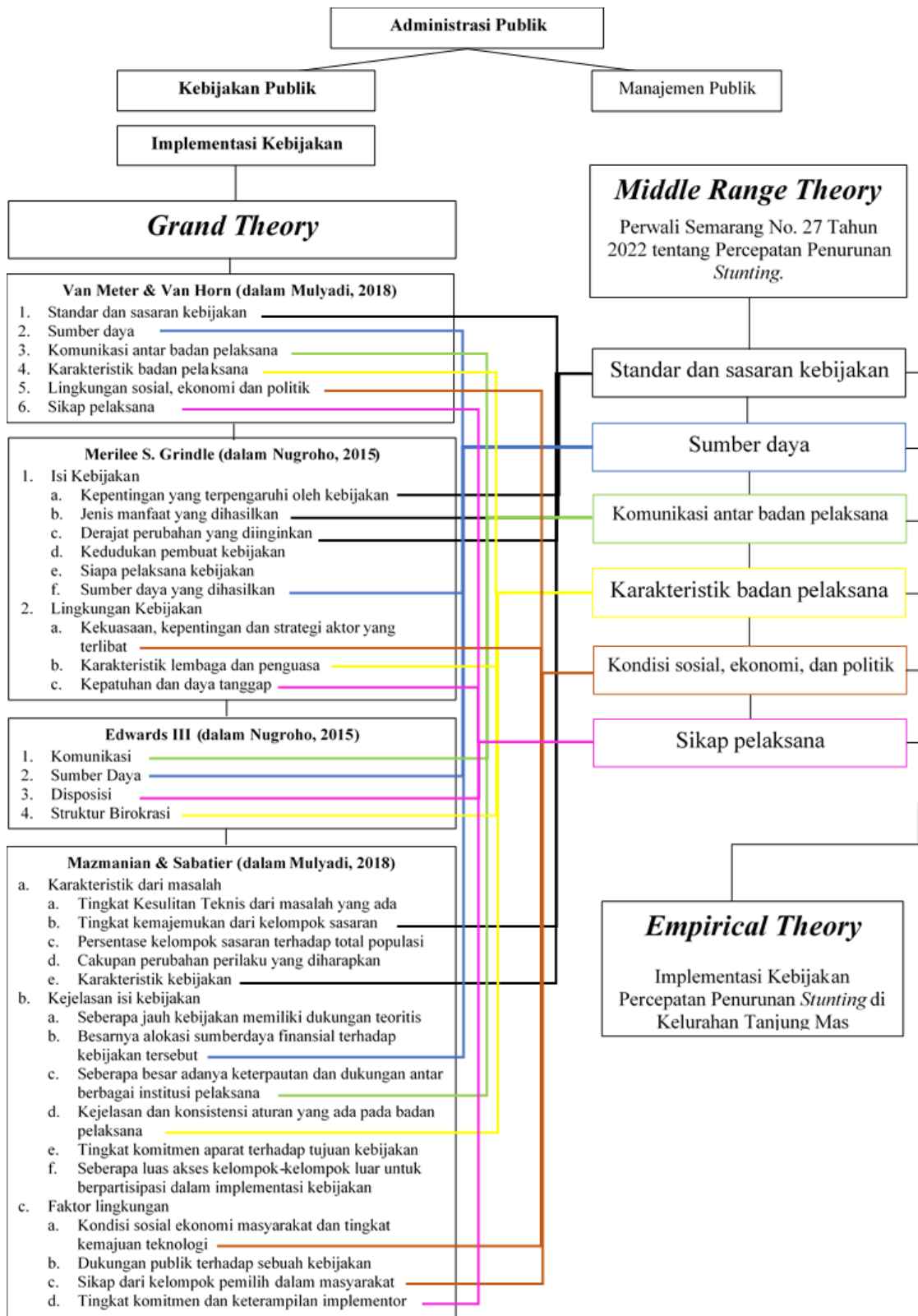
- f. Disposisi implementor, memperhatikan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Dalam menilai kecenderungan implementor perlu memperhatikan tiga hal penting, yakni:
- a. Respons implementor terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi keinginan untuk melaksanakan kebijakan, respon tersebut biasanya berbentuk penerimaan, netralisasi, dan penolakan.
 - b. Kognisi, yakni pemahaman implementor terhadap kebijakan.
 - c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai seorang implementor.



Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

Sumber: Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018)

1.7 Kerangka Teori



1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena Penelitian	Sub Fenomena		Gejala yang diamati di lapangan
Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kelurahan Tanjung Mas	Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Pasal 2, pasal 7, pasal 15, & pasal 16	1. Tujuan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (Pasal 2): 2. Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (Pasal 7): a. perencanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; b. meningkatkan sistem manajemen data terpadu dan informasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; c. mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; d. partisipasi masyarakat dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; dan e. integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (Pasal 15 dan Pasal 16).
		Pasal 3, pasal 8 dan pasal 9	1. Pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dengan kelompok sasaran (remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah usia 5 tahun). 2. Program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah.
		Pasal 4 & pasal 5	Pencapaian target prevalensi <i>stunting</i> yang diukur pada anak usia di bawah 5 tahun sebesar 4% pada tahun 2024.
		Pasal 6	Pelaksanaan 5 pilar dalam strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
	Penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Pasal 10	Pemerintah kota melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
		Pasal 11	1. Koordinasi kelurahan dalam melaksanakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> 2. Prioritas penggunaan dana kelurahan dalam upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> 3. Optimalisasi program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
	Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Pasal 12	Pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) di tingkat Kota dan tingkat Kelurahan
		Pasal 14	
	Pendanaan	Pasal 17	Sumber pendanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
Faktor pendukung dan penghamat	Standar dan sasaran kebijakan		1. Standar Perwal Semarang No. 27 Tahun 2022 2. Sasaran Perwal Semarang No. 27 Tahun 2022
	Sumber daya		1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 2. Anggaran 3. Sarana dan Prasarana
	Komunikasi antar badan pelaksana		Komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana

Fenomena Penelitian	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan
	Karakteristik badan pelaksana	Struktur organisasi
	Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	1. Kondisi ekonomi 2. Kondisi sosial 3. Dukungan aktor politik
	Disposisi	1. Respon Implementor 2. Tingkat pemahaman 3. Motivasi implementor

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

1.9 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ristiani (2020) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penulisan kata-kata ataupun ucapan serta ikut mengamati berbagai perilaku dari orang-orang. Dalam penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data sangat penting untuk menjelaskan temuan penelitian dan memastikan pertanggungjawaban hasil penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memahami fenomena yang dinamis dengan menggali data, informasi, dan fakta dari lapangan. Data dikumpulkan secara langsung dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Latar belakang peneliti memilih daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena Kelurahan Tanjung Mas memiliki kasus *stunting* tertinggi di Kecamatan Semarang

Utara, bahkan menduduki peringkat pertama se-Kota Semarang. Selain itu, pemerintah Kota Semarang telah melakukan beragam upaya untuk menekan tingkat kasus *stunting*, diantaranya Kelurahan Tanjung Mas masuk daftar lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* di Kota Semarang tahun 2021 & 2022. Kelurahan ini juga menjadi *pilot project* penanganan *stunting* tahun 2021. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal untuk mengatasi *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, ditandai dengan tingginya jumlah balita yang mengalami *stunting* di wilayahnya.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi di dalam sebuah penelitian. Teknik yang digunakan untuk mencari informan adalah *purposive sampling* adalah metode pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan oleh peneliti dan *Random sampling* adalah metode di mana setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden.

Tabel 1.7 Pemilihan Informan

Jabatan	Teknik	Total	Jumlah
Pegawai Seksi Gizi Bidang Kesmas DKK Semarang	<i>Random sampling</i>	6	1
Kasi. Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tanjung Mas	<i>Purposive sampling</i>	1	1
Pegawai Tenaga Gizi dan Konseling gizi UPT Puskesmas Bandarharjo	<i>Random sampling</i>	3	1
Ketua Forum Posyandu Kelurahan Tanjung Mas	<i>Purposive sampling</i>	1	1
Posyandu Tanjung Mas	<i>Random sampling</i>	16	1
Ibu balita <i>stunting</i>	<i>Random sampling</i>	89	2

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

1.9.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018), sumber data meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

1) Data Sekunder

Data sekunder digunakan penelitian ini berupa studi pustaka dari buku-buku literatur, internet/berita, penelitian terdahulu, undang-undang, artikel jurnal, laporan data statistika dari BPS, dan sumber lainnya.

2) Data Primer

Sumber ini data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Keseluruhan data primer ini akan diolah menjadi rekaman wawancara, transkrip hasil wawancara, dan foto hasil dokumentasi.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sehingga akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, sekaligus memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

1. Wawancara

Metode ini memuat sejumlah pertanyaan yang menuntun jawaban sesuai dalam pedoman wawancara yang telah disusun. Dalam kegiatan wawancara menggunakan alat bantu perekam suara yang terdapat di *smartphone*.

2. Dokumentasi

Teknik ini berfungsi sebagai metode pendukung wawancara dalam penelitian kualitatif, memberikan data tambahan yang memperkuat informasi dari wawancara serta membantu peneliti menguji keakuratan data.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman (2014), menyatakan tiga alur dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi data

Kondensasi data adalah teknik untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasi data agar lebih jelas dan rinci, dengan tujuan menyaring data yang tidak relevan melalui ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, dan pembuatan kategori, sehingga memudahkan pengecekan dan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data berupa pengumpulan, penyatuan, dan pengorganisasian informasi atau data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diambil tindakan. Data disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak pengumpulan data dan divalidasi melalui verifikasi, yang meliputi review penulisan, mempelajari catatan lapangan, diskusi, dan upaya lainnya untuk memastikan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.7 Keabsahan Data

Sugiyono (2017:270-277) menjelaskan beberapa cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal), yaitu proses pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemeriksaan yang teliti dan hati-hati untuk menghasilkan data olahan yang akurat dan tepat.
2. Uji Transferabilitas (Validitas Eksternal), di mana peneliti memberikan penjelasan yang jelas, rinci, dan sistematis agar hasil penelitian dapat dipahami dan diterapkan pada penelitian lain.
3. Uji Dependability (Reliabilitas), yang melibatkan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mengevaluasi dan merevisi penelitian guna menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam proses penelitian dan menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan.
4. Uji Confirmability (Objektivitas), di mana dokumentasi berupa foto dengan informan di dalam penelitian ini dan surat telah melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang digunakan untuk memastikan data yang diperoleh objektif.